

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Kartu Sakti Penggerak Roda Kota Jakarta

Fransiskus Wisnu Wardhana Dany

Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menetas satu dasawarsa lalu dalam upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak tidak mampu. Kartu ini kemudian berkembang hingga dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Jakarta.

Kabar tentang akan dihapusnya KJP Plus dan diganti dengan sekolah swasta gratis sudah sampai ke telinga Rizky (29). Pengelola Toko Sigrah.Id di Palmerah, Jakarta Barat, ini sedikit gusar karena bakal kehilangan pelanggan tetap.

"Selama ini lumayan banyak penerima KJP yang belanja di sini. Tetapi, memang tahun ini agak kurang karena infonya penerimaan diperketat. Ada juga yang bilang kalau KJP-nya dicabut," katanya sambil mencatat pesanan alat tulis dan perlengkapan kantor dari seorang pelanggan, Rabu (28/8/2024).

Setidaknya ada satu atau dua penerima KJP Plus yang mampir ke tokonya setiap pekan. Mereka mengeluarkan uang mulai dari Rp 50.000 sampai Rp 200.000.

Nominal sebesar itu sudah cukup melancarkan arus barang dan kas di tokonya. Apalagi penerima KJP Plus pasti berbelanja selama masih punya sisa bantuan setiap bulan.

"Sudah tentu mereka bantu perputaran uang di sini (toko). Kami akan kena dampaknya kalau dihapus. Semoga saja ada solusi atau alternatif lain dari pemerintah," katanya.

Toko Uni di Jatipulo, Jakarta Barat, juga punya pelanggan tetap dari penerima KJP Plus. Mereka membeli seragam sekolah, tas, atau sepatu yang nilainya Rp 150.000 ke atas.

Dalam sebulan, Herman (52), pemilik Toko Uni, bisa mengantongi hingga Rp 3 juta dari penerima KJP Plus saja. Tak mengherankan, ia menyayangkan wacana penghapusan KJP Plus.

"Ada saja yang datang belanja kalau perlengkapan se-

kolah sudah jelek. Lumayan bantu-bantu kami menghadapi gempuran toko online," ujarnya.

Toko Sigrah.Id dan Toko Uni merupakan bagian dari 2.000 lebih rekanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program KJP Plus. Penerima bantuan dapat membeli alat tulis atau perlengkapan sekolah lainnya di toko rekanan tersebut dengan cara menggesek mesin *electronic data capture* atau EDC Bank DKI.

Sementara itu, terdapat 533.649 penerima KJP Plus pada 2024 berdasarkan data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seluruhnya menerima bantuan dengan total anggaran Rp 2,46 triliun.

Selain alat tulis atau perlengkapan sekolah, penerima KJP Plus juga dapat memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Roda perekonomian

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, KJP Plus berdampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian. Dampak langsungnya, yaitu pembelian barang (sepatu, buku, dan lainnya), akan menambah konsumsi sektor usaha di Jakarta.

"Kalau tidak langsung punya dampak jangka pendek dari pembelian barang kebutuhan sekolah yang bisa menggerakkan industri manufaktur, seperti alas kaki dan kertas. Jangka panjangnya, menaikkan kualitas pembangunan manusia," tuturnya, Kamis (29/8) sore.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurrahman juga menyampaikan

hal serupa. Berdasarkan evaluasinya terhadap KJP Plus pada 2022, dana bantuan sosial (bansos) pendidikan ini menopang konsumsi warga tidak mampu. Anak-anak mereka pun bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa khawatir putus sekolah di tengah jalan.

"Konsumsi masyarakat naik, otomatis ekonomi bergerak. Ini dampak positif KJP Plus," katanya secara terpisah.

Di samping itu, KJP Plus sangat membantu pekerja dan tenaga kerja kelas menengah ke bawah. Sebab, penghasilan mereka yang pas-pasan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain di luar pendidikan atau telah dijangkau KJP Plus.

Menurut Rizal, hal tersebut membuat angka kemiskinan tidak bertambah atau warga tidak jatuh dalam kemiskinan. Untuk itu, KJP Plus seharusnya dioptimalkan dengan memperbaiki kekurangan atau hasil evaluasi yang ada saat ini, seperti salah sasaran dan salah pemanfaatan.

"Ujung-ujungnya, kan, untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Evaluasi

Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menganalisis 596.233 siswa dari total 656.390 penerima KJP Plus pada 2023. Hasilnya, 92,17 persen siswa memiliki nilai rata-rata rapor 76-91.

Kemudian, 0,52 persen siswa memperoleh prestasi akademik dan non-akademik dari perlombaan atau kejuaraan, 0,08 persen melanggar ketentuan penerima KJP Plus, dan 97,74 persen siswa menghadiri 203 hari belajar efektif.

Pada tahun yang sama juga tercatat 492 siswa melanggar aturan KJP Plus. Mereka terlibat tawuran, perundungan, kekerasan seksual, menggadaikan kartu, tidak masuk sekolah, dan lainnya.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menyampaikan sejumlah catatan terhadap kinerja atau efektivitas KJP Plus dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022. Disebutkan bahwa regulasi dan

pendataan calon penerima KJP Plus belum sepenuhnya menghasilkan data yang valid dan pendistribusian kartu atau buku tabungan kepada penerima belum tepat waktu.

BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk menyempurnakan peraturan gubernur atau petunjuk teknis KJP Plus, seperti mengatur pendataan calon penerima KJP Plus yang melibatkan satuan pendidikan dalam menjalin dan mengusulkan calon penerima. Kemudian, memerintahkan Direktur Utama Bank DKI agar meningkatkan pelayanan dalam pendistribusian kartu ATM atau buku tabungan sehingga mendekatkan layanan kepada penerima bantuan dan lebih fleksibel waktu layanannya.

Sekolah swasta gratis

Rencana penghapusan KJP Plus ini mengemuka untuk memberikan kesempatan setara bagi peserta didik. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menekankan, program sekolah swasta gratis ini demi keadilan sosial karena keterbatasan kuota sekolah negeri.

Untuk sekolah gratis ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara bertahap akan menawarkan kerja sama kepada 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat sehingga dapat berjalan pada 2025. Pada saat yang sama juga disiapkan program pengganti KJP Plus yang akan dihapus.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menuturkan, berdasarkan hasil kajian dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama para konsultan beberapa bulan lalu, total kebutuhan program pendidikan gratis di sekolah swasta diperkirakan Rp 2,3 triliun per tahun.

Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran KJP yang mencapai Rp 2,8 triliun setiap tahun. Dengan alokasi anggaran tersebut, program sekolah swasta gratis ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa di sekolah swasta, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.

"Selisih uang sekitar Rp 500 miliar ini nantinya bisa diberikan kepada anak-anak untuk membeli keperluan sekolah guna menunjang pendidikannya, seperti untuk membeli seragam dan alat tulis-menulis," katanya, Selasa (*Kompas*, 28/8/2024).

Apa pun kebijakannya, semangat pemerataan pendidikan harus dikedepankan. Namun, kebijakan itu tetap harus dikaji mendalam sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.